

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat [1]

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, dan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH [2]

Dalam pemilihan golongan keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan kejelian dalam

penilaian dan juga harus selektif berdasarkan penilaian dari beberapa aspek ataupun kriteria untuk menentukan golongan keluarga kurang mampu yang layak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) guna meningkatkan dan menghasilkan Sumber Daya Manusia, status kesehatan, serta meningkatkan taraf pendidikan kedepannya bagi Nagari Kampung Dalam.

Kampung Dalam adalah sebuah Nagari di Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Siunjung, di Provinsi Sumatera Barat. Nagari Kampung Dalam terdiri dari 3 jorong yaitu, Jorong Koto, Jorong Limau Sundai dan Jorong Palintangan. Sesuai dengan terbitnya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan diperkuat oleh Perda No 1 tahun 2000 tentang kembali ke Nagari dengan pemerintahan terendah adalah Pemerintahan Desa yang kembali menjadi Pemerintahan Nagari (khususnya Provinsi Sumatera Barat) yang dipimpin oleh Wali Nagari. Sejak saat itulah Kampung Dalam menjadi Nagari sampai sekarang.

Perkembangan masyarakat dan perekonomian yang tidak merata, pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), untuk pembagian program yang lebih adil dan efisien Kantor wali Nagari Kampung Dalam memerlukan sebuah program yang bisa menilai atau memberikan sebuah keputusan mengenai penerima yang layak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Menurut Karim “Promethee adalah salah satu metode penentuan urutan atau prioritas dalam MCDM (Multi Criteria Decision Making).” Dugaan dari dominasi

kriteria yang digunakan dalam promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. Promethee adalah suatu metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis multi-kriteria. Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam Promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. Metode ini termasuk metode peringkat yang cukup sederhana dalam konsep dan aplikasi dibandingkan dengan metode lain untuk analisis multi-kriteria.

Aplikasi system penunjang keputusan menggunakan metode Promethee ini, diharapkan akan membantu pihak pemerintahan nagari dalam menentukan keluarga kurang mampu yang akan menerima bantuan PKH dengan perhitungan dan pertimbangan yang lebih cepat, akurat dan adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk merancang sebuah sistem informasi penunjang keputusan yang dapat membantu menghasilkan sebuah keputusan yang tepat untuk pihak yang mengurus peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga penulis mengangkat skripsi dengan judul **：“PERANCANGAN SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA NAGARI KAMPUNG DALAM MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka teridentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimana merancang suatu sistem pendukung keputusan untuk penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH) berbasis web?
2. Bagaimana dengan sistem informasi yang dirancang dapat memberikan kemudahan dalam menentukan keputusan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) ?
3. Bagaimana melakukan penerapan metode *Promethee* pemilihan keluarga kurang mampu pada Nagari Kampung Dalam ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini terarah dan tujuan dari penulis ini tercapai sesuai diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu :

1. Sistem pendukung keputusan ini hanya untuk menyeleksi calon penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).
2. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL.
3. Input berupa data kriteria, data calon penerima dan parameter calon penerima bantuan.

4. Output berupa hasil seleksi penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).
5. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode PROMETHEE.
6. Data didapatkan dari rekap data pemerintahan nagari kampung dalam.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat membantu pihak yang mengurus peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Nagari Kampung Dalam selanjutnya dengan adanya situs website Sistem Penunjang Keputusan yang diciptakan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySql yang di aplikasikan pihak pemerintahan nagari.
2. Diharapkan dengan adanya situs website ini dapat mempermudah pengambilan keputusan oleh pihak yang mengurus peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjadi acuan dalam memilih peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Diharapkan dengan adanya situs website ini dapat memperkenalkan metode *Promethee* yang diterapkan dalam pembuatan aplikasi dalam pengambilan sebuah keputusan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari perancangan sistem penunjang keputusan ini adalah :

1. Merancang serta membangun aplikasi sistem penunjang keputusan untuk menyeleksi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan penerima bantuan Proram Keluarga Harapan (PKH).

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan keuntungan yang akan dihasilkan oleh rancangan sistem informasi ini adalah:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu masyarakat, khususnya pegawai dalam menentukan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas penentuan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih adil.

1.7 Tinjauan umum objek penelitian

Tinjauan umum merupakan sebuah gambaran umum yang meliputi beberapa cakupan seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta deskripsi jabatan. Disini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum yang meliputi sejarah, visi

dan misi, struktur organisasi serta lingkup pekerjaan di Kantor Wali Nagari Kampung Dalam.

1.7.1 Sejarah objek penelitian

Sebelum ber Kampung Dalam adalah berkoto yaitu tango batu, yang mana koto tango batu tersebut salah satu koto dari koto nan ampek dikerajaan Jambu Lipo. Kemudian ditinggalkan tango batu, sementara berkorong di Dusun Palintangan sekarang dari situlah nenek moyang Kampung Dalam berbasis mencari bancah panarukohan mencari ranah dijadikan koto, terdapat lokasinya di koto Kampung Dalam sekarang. Sampai sekarang masih dinamakan koto Kampung Dalam oleh masyarakat nagari kampung dalam.

Setelah dapat ranah dijadikan koto dibangunlah disana sebuah rumah yang berfungsi Kampung Rajo dan bernama Rumah Dalam, “mangko banamo Rumah Dalam karano disitu tampek kunci Kerajaan Jambu Lipo dan kebesaran sampai kerantau duo baleh koto kunci dipacik dek Tuan godang”.

Pada abad kedua belas dibentuk Nagari, diberi nama Kampung Dalam, Kampung Dalam tersebut adalah kesimpulan Kampung Rajo dan Rumah Dalam. Dipertengahan tahun 1948 tokoh-tokoh masyarakat Nagari Kampung Dalam mengusulkan kepada Bupati Sawahlunto Sijunjung dengan menghadap langsung ke kantor Bupati di Sawahlunto, yang mana mengusulkan Nagari Kampung Dalam diakui pemerintahannya berstatus Nagari sendiri.

Pada tahun 1949 keluarlah surat keputusan Bupati Sawahlunto Sijunjung bahwa Nagari Kampung Dalam diakui berstatus Nagari Tepatan dengan Wali Nagari Abusamar Dt Ompang Sati dan Bupati Sawalunto Sijunjung pada masa itu bernama Sutan Tuah Bagindo Ratu dan Camat Sijunjung Abdul Rauf.

Pada tahun 1958 terjadilah perang saudara di Negara RI yang dikenal dengan perang PRRI dipimpin oleh Muhamad Husein, pada tahun 1961 PRRI menyerah dan kalah oleh pemerintahan pusat. Didalam keadaan transisi di Lubuk Tarok telah dibentuk pemerintahan Nagari dengan Wali Nagari Abdul Aziz Sutan kebesaran yang ditunjuk langsung oleh TNI yang berkesatuan YON 451 kiranya Nagari Kampung Dalam telah dijadikan daerah teritorial Nagari Lubuk Tarok tanpa musyawarah dengan unsur pimpinan Nagari Kampung Dalam. Dengan berakhirnya PRRI berakhir pulalah pemerintahan nagari kampung dalam.

Semenjak tahun 1961 nagari kampung dalam berstatus jorong dalam kewilayahan telah masuk kedalam wilayah pemerintahan Nagari Lubuk Tarok yang bernama jorong Kampung Dalam. Pada tahun 1983 Kampung Dalam berstatus Desa percobaan dengan Kepala Desa N.Merancang Tuah. Pada 1984-1999 Kampung Dalam berstatus Desa defentif dengan pimpinan Kepala Desa terpilih pada masa itu.

Terbitnya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan diperkuat oleh Perda No 1 tahun 2000 tentang kembali ke Nagari dengan pemerintahan terendah adalah Pemerintahan Desa yang kembali menjadi Pemerintahan Nagari (khususnya Provinsi Sumatera Barat) yang dipimpin oleh Wali Nagari. Sejak saat itulah

Kampung Dalam menjadi Nagari sampai sekarang. Adapun visi, misi pada kantor wali nagari kampung dalam yaitu:

1. Visi

“Mewujudkan nagari yang aman, mandiri dan sejahtera berlandaskan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”.

2. Misi

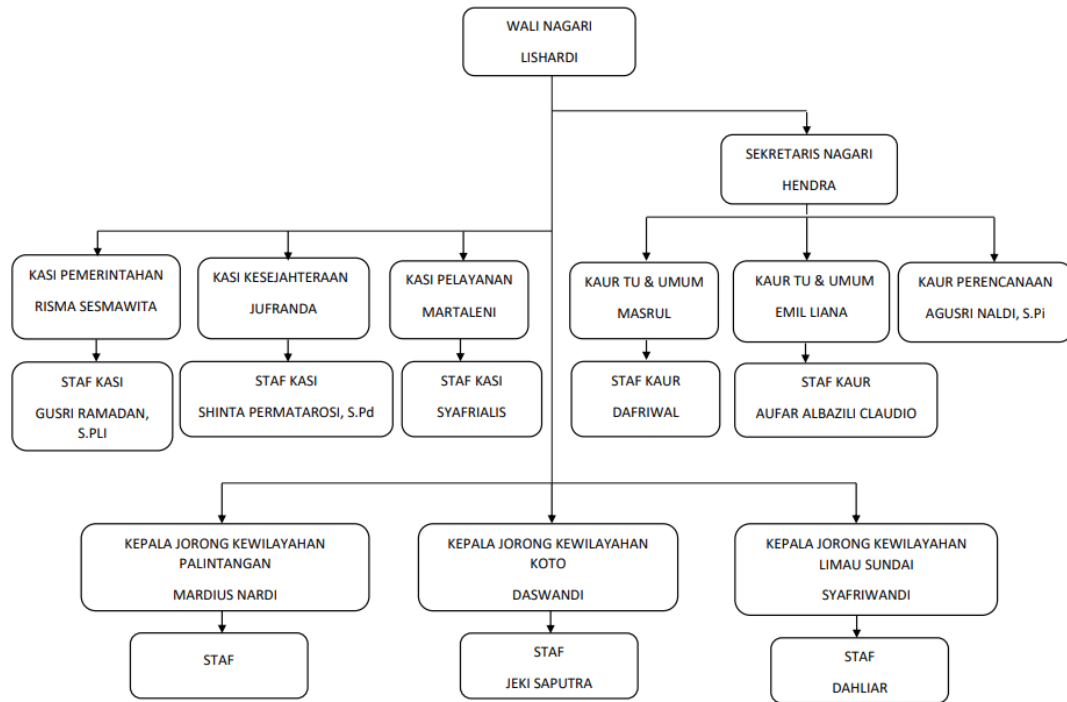
- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam serta penyediaan fasilitas untuk kegiatan keagamaan.
- b. Mewujudkan lingkungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum adat.
- c. Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat nagari kampung dalam dengan melaksanakan sepenuhnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan jaminan kepastian hukum sebagai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat nagari kampung dalam melalui pembinaan dan pemberdayaan, pengoptimalan sumber daya alam dan insdustri rumah tangga, serta peningkatan pendidikan formal maupun nonformal secara profesional, efektif dan efesien.

- e. Melaksanakan tata kehidupan bermasyarakat sesuai ketentuan adat salingka nagari melalui kerjasama dengan ninik mamak, tokoh adat, dan tokoh budaya.
- f. Mewujudkan peningkatan pengasilan masyarakat nagari terutama petani dan pedagang dengan menggali potensi yang ada dinagari kampung dalam, dengan salah satu unggulan pengelolaan sumber daya perikanan.

1.7.2 Struktur organisasi

Struktur organsasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, agar setiap orang yang ada dalam satu organisasi tersebut mengetahui pekerjaan yang harus dilakukan dan kepada siapa harus bertanggung jawab, serta mengetahui siapa atasan dan siapa bawahan. Hubungan harus jelas dan dapat diketahui sampai dimana batas dan tanggung jawab dari pekerjaannya yang di jelaskan dalam bentuk struktur organisasi.

Struktur organisasi Kantor Wali Nagari Kampung Dalam secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organinsasi Kantor Wali Nagari

1.7.3 Lingkup pekerjaan

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diuraikam tugas-tugas dari setiap bagian pada struktur organisasi Kantor Wali Nagari Kampung Dalam

1. Wali Nagari
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan peraturan nagari
 - c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan Bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagaru mengenai APB nagari untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
- f. Membina ekonomi Nagari
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif

2. Sekretaris Nagari

Membantu Wali Nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi nagari, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

3. Kaur Umum dan Perencanaan

Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan

4. Kaur Keuangan

Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Nagari, pengelolaan administrasi Keuangan Nagari dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari

5. Kepala Jorong

- a. Membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat

- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu wali nagari dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan diwilayah kerja
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari